

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 terdapat kesalahan penempatan pagu alokasi dana desa untuk 4 (empat) desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati dimaksud sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran; b. bahwa desa yang mendapat perubahan atas pagu alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Desa Simberuna, Desa Perjaga, Desa Mbinalun dan Desa Malum Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
	Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055); 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018</p>
<p>7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 13).</p>	<p>7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 13);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 63);</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2).</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
	Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan 	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
<p>pemberdayaan masyarakat.</p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p> <p>12. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p>	
BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA	BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 2	Pasal 2
Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.480.170.600,- (Tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa	Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa
Pasal 3	Pasal 3
(1) Besaran pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Penghasilan Tetap Aparatur Desa, Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi	Tetap

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018</p>
<p>Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut : $ADDx = \Sigma SilTapx + \Sigma ADDMx + \Sigma ADDPx$.</p> <p>(2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten. <p>(3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.</p> <p>(4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi dana desa dengan bobot sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk; b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan; c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis. <p>(5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $ADDP = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDkab - ADDMkab)$ <p>Keterangan: ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk</p>	

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018</p>
<p>desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa. ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak Bharat. ADDM = Pagu alokasi dana desa merata. (6) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">Bagian Kedua Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa dan Tunjangan BPD</p>	<p align="center">Bagian Kedua Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa dan Tunjangan BPD</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan; b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; d. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; f. Bendahara Desa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan; g. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018</p>
<p>puluh ribu rupiah) per bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua BPD sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan; c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; d. Anggota BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. <p>(3) Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dibebankan pada Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.</p> <p>(4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan staf pada urusan keuangan.</p> <p>(5) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya ditampung sebanyak 1 (satu) orang.</p> <p>(6) Penganggaran penghasilan tetap dari unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku bagi klasifikasi desa swadaya.</p> <p>(7) Pembagian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2018 setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA</p>	<p align="center">BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap.</p> <p>(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :</p> <p>a. Penyaluran tahap I paling lambat pada bulan April tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. Penyaluran tahap II paling lambat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan</p> <p>c. Penyaluran tahap III paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Penyaluran ADD tahap berikutnya baru dapat direalisasikan setelah SPJ tahap sebelumnya telah disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p> <p>(4) ADD disalurkan melalui bank pemerintah yang dihunjak oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(5) Penyampaian SPJ ADD tahap III selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2018 dan batas akhir penarikan ADD dari bank pemerintah yang telah dihunjak adalah minggu I (Pertama) bulan Desember 2018.</p> <p>(6) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD disampaikan oleh Pemerintah Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat setelah mendapat verifikasi dari Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2018
Pasal 6	Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.	
	Pasal II
	<p>(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
Ditetapkan di Salak pada tanggal 2 Januari 2018 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU	Ditetapkan di Salak pada tanggal 12 Maret 2018 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal 3 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA	Diundangkan di Salak pada tanggal 13 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2018

NO.	NAMA DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA (SiTapx)	ADD-MERATA (ADDMx)	ADD-PROPORSIONAL (ADDPx)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE			1,296,988,741	7,174,276,521
1	TANJUNG MERIAH	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 135,716,816	Rp 712,645,594
2	TANJUNG MULIA	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 142,158,492	Rp 755,087,270
3	KABAN TENGAH	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 237,545,834	Rp 850,474,612
4	BANDAR BARU	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 180,913,399	Rp 781,842,177
5	SIMBERRUNA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 84,770,362	Rp 649,699,140
6	PEROLIHEN	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 103,637,948	Rp 692,566,726
7	MAHOLIDA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 84,716,029	Rp 673,644,807
8	PERJAGA	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 76,956,053	Rp 653,884,831
9	MALUM	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 117,234,911	Rp 706,163,689
10	MBINALUN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 133,338,897	Rp 698,267,675
II	KEC. KERAJAAN			989,228,571	Rp 6,722,516,351
11	SUKARAMAI	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 124,512,912	Rp 701,441,690
12	KUTA SAGA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 67,903,454	Rp 632,832,232
13	KUTA MERIAH	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 95,532,347	Rp 660,461,125
14	KUTA DAME	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 170,056,750	Rp 770,985,528
15	PARPULUNGEN	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 162,109,104	Rp 751,037,882
16	PARDOMUAN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 54,966,761	Rp 619,895,539
17	MAJANGGUT I	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 111,448,055	Rp 688,376,833
18	MAJANGGUT II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 78,034,182	Rp 642,962,960
19	SURUNG MERSADA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 62,633,275	Rp 627,562,053
20	PERDUHAPEN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 62,031,731	Rp 626,960,509
III	KEC. SALAK			Rp 751,951,403	Rp 4,288,524,071
21	SALAK I	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 128,515,283	Rp 717,444,061
22	SALAK II	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 91,404,280	Rp 680,333,058
23	BOANGMANALU	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 161,851,736	Rp 750,780,514
24	SIBONGKARAS	Rp 176,400,000	Rp 415,528,778	Rp 136,887,137	Rp 728,815,915
25	KUTA TINGGI	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 147,676,819	Rp 736,605,597
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 85,616,148	Rp 674,544,926

IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU			Rp 459,094,921	Rp 3,319,738,811
27	ULU MERAH	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 89,795,215	Rp 654,723,993
28	PARDOMUAN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 104,606,328	Rp 669,535,106
29	SILIMA KUTA	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 96,468,432	Rp 673,397,210
30	LAE LANGGE NAMUSENG	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 92,534,659	Rp 669,463,437
31	CIKAOK	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 75,690,287	Rp 652,619,065
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT			Rp 471,370,975	Rp 3,380,014,865
32	KECUPAK I	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 86,049,443	Rp 674,978,221
33	KECUPAK II	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 135,085,538	Rp 748,014,316
34	AORNAKAN I	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 93,901,868	Rp 670,830,646
35	SIMERPARA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 67,106,466	Rp 632,035,244
36	AORNAKAN II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 89,227,660	Rp 654,156,438
VI	KEC. PAGINDAR			Rp 347,918,741	Rp 2,607,633,853
37	SIBAGINDAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 90,003,416	Rp 654,932,194
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 75,329,004	Rp 640,257,782
39	LAE MBENTAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 94,834,130	Rp 659,762,908
40	PAGINDAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 87,752,191	Rp 652,680,969
VII	KEC. TINADA			Rp 519,667,713	Rp 3,984,240,381
41	KUTA BABO	Rp 164,400,000	Rp 415,528,778	Rp 77,244,161	Rp 657,172,939
42	TINADA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,983,252	Rp 647,912,030
43	SILIMA KUTA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 102,028,786	Rp 690,957,564
44	MAHALA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 101,069,955	Rp 689,998,733
45	PRONGIL	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,906,049	Rp 659,834,827
46	BULUH TELLANG	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 73,435,510	Rp 638,364,288
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE			Rp 565,653,079	Rp 4,003,225,747
47	SIEMPAT RUBE II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 103,658,317	Rp 668,587,095
48	SIEMPAT RUBE I	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 94,924,259	Rp 659,853,037
49	MUNGKUR	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,911,821	Rp 659,840,599
50	SIEMPAT RUBE IV	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 144,181,583	Rp 745,110,361
51	KUTA JUNGAK	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 85,503,323	Rp 650,432,101
52	TRAJU	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 54,473,776	Rp 619,402,554
Total		8,470,800,000	Rp 21,607,496,456	Rp 5,401,874,144	Rp 35,480,170,600

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2018

NO.	NAMA DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA (SilTapx)	ADD-MERATA (ADDMx)	ADD-PROPORSIONAL (ADDPx)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE			1,296,988,741	7,174,276,521
1	TANJUNG MERIAH	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 135,716,816	Rp 712,645,594
2	TANJUNG MULIA	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 142,158,492	Rp 755,087,270
3	KABAN TENGAH	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 237,545,834	Rp 850,474,612
4	BANDAR BARU	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 180,913,399	Rp 781,842,177
5	SIMBERRUNA	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 84,770,362	Rp 661,699,140
6	PEROLIHEN	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 103,637,948	Rp 692,566,726
7	MAHOLIDA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 84,716,029	Rp 673,644,807
8	PERJAGA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 76,956,053	Rp 641,884,831
9	MALUM	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 117,234,911	Rp 682,163,689
10	MBINALUN	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 133,338,897	Rp 722,267,675
II	KEC. KERAJAAN			989,228,571	Rp 6,722,516,351
11	SUKARAMAI	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 124,512,912	Rp 701,441,690
12	KUTA SAGA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 67,903,454	Rp 632,832,232
13	KUTA MERIAH	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 95,532,347	Rp 660,461,125
14	KUTA DAME	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 170,056,750	Rp 770,985,528
15	PARPULUNGEN	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 162,109,104	Rp 751,037,882
16	PARDOMUAN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 54,966,761	Rp 619,895,539
17	MAJANGGUT I	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 111,448,055	Rp 688,376,833
18	MAJANGGUT II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 78,034,182	Rp 642,962,960
19	SURUNG MERSADA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 62,633,275	Rp 627,562,053
20	PERDUHAPEN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 62,031,731	Rp 626,960,509
III	KEC. SALAK			Rp 751,951,403	Rp 4,288,524,071
21	SALAK I	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 128,515,283	Rp 717,444,061
22	SALAK II	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 91,404,280	Rp 680,333,058
23	BOANGMANALU	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 161,851,736	Rp 750,780,514

24	SIBONGKARAS	Rp 176,400,000	Rp 415,528,778	Rp 136,887,137	Rp 728,815,915
25	KUTA TINGGI	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 147,676,819	Rp 736,605,597
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 85,616,148	Rp 674,544,926
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU			Rp 459,094,921	Rp 3,319,738,811
27	ULU MERAH	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 89,795,215	Rp 654,723,993
28	PARDOMUAN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 104,606,328	Rp 669,535,106
29	SILIMA KUTA	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 96,468,432	Rp 673,397,210
30	LAE LANGGE NAMUSENG	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 92,534,659	Rp 669,463,437
31	CIKAOK	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 75,690,287	Rp 652,619,065
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT			Rp 471,370,975	Rp 3,380,014,865
32	KECUPAK I	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 86,049,443	Rp 674,978,221
33	KECUPAK II	Rp 197,400,000	Rp 415,528,778	Rp 135,085,538	Rp 748,014,316
34	AORNAKAN I	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 93,901,868	Rp 670,830,646
35	SIMERPARA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 67,106,466	Rp 632,035,244
36	AORNAKAN II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 89,227,660	Rp 654,156,438
VI	KEC. PAGINDAR			Rp 347,918,741	Rp 2,607,633,853
37	SIBAGINDAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 90,003,416	Rp 654,932,194
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 75,329,004	Rp 640,257,782
39	LAE MBENTAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 94,834,130	Rp 659,762,908
40	PAGINDAR	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 87,752,191	Rp 652,680,969
VII	KEC. TINADA			Rp 519,667,713	Rp 3,984,240,381
41	KUTA BABO	Rp 164,400,000	Rp 415,528,778	Rp 77,244,161	Rp 657,172,939
42	TINADA	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,983,252	Rp 647,912,030
43	SILIMA KUTA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 102,028,786	Rp 690,957,564
44	MAHALA	Rp 173,400,000	Rp 415,528,778	Rp 101,069,955	Rp 689,998,733
45	PRONGIL	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,906,049	Rp 659,834,827
46	BULUH TELLANG	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 73,435,510	Rp 638,364,288
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE			Rp 565,653,079	Rp 4,003,225,747

47	SIEMPAT RUBE II	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 103,658,317	Rp 668,587,095
48	SIEMPAT RUBE I	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 94,924,259	Rp 659,853,037
49	MUNGKUR	Rp 161,400,000	Rp 415,528,778	Rp 82,911,821	Rp 659,840,599
50	SIEMPAT RUBE IV	Rp 185,400,000	Rp 415,528,778	Rp 144,181,583	Rp 745,110,361
51	KUTA JUNGAK	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 85,503,323	Rp 650,432,101
52	TRAJU	Rp 149,400,000	Rp 415,528,778	Rp 54,473,776	Rp 619,402,554
Total		8,470,800,000	Rp 21,607,496,456	Rp 5,401,874,144	Rp 35,480,170,600